

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap poligami ulama merupakan perpaduan kompleks antara penghormatan religius dan tuntutan etis yang ketat. Masyarakat tidak memandang poligami sebagai hak mutlak, melainkan tindakan yang harus didasari oleh motif maslahat, seperti menolong janda atau menjaga nasab, serta wajib memenuhi prasyarat transparansi melalui izin istri pertama. Ulama diposisikan sebagai teladan moral yang tindakannya memiliki dampak sistemik terhadap citra institusi agama; oleh karena itu, praktik poligami yang dianggap hanya menuruti hawa nafsu atau dilakukan secara sembunyi-sembunyi memicu guncangan afektif berupa kekecewaan mendalam hingga penolakan pasif dari jamaah.

Ditinjau dari teori patriarki Sylvia Walby, fenomena ini menunjukkan kuatnya struktur patriarki privat dan publik di mana otoritas laki-laki, khususnya tokoh agama yang matang, sering kali mendapatkan pemakluman dan pembenaran melalui narasi agama. Perempuan cenderung masih diposisikan secara fungsional dalam ranah domestik dan reproduksi, sementara hak negosiasi mereka sering kali tereduksi menjadi sekadar formalitas legal. Meski demikian, terjadi pergeseran persepsi di mana masyarakat mulai bersikap kritis dan menunjukkan pembelaan terhadap hak emosional perempuan ketika praktik poligami tersebut memicu konflik domestik atau perilaku

yang tidak konsisten dengan nilai-nilai kealiman, menandakan bahwa otoritas patriarki tidak lagi bersifat absolut di hadapan prinsip keadilan yang kasat mata.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil temuan Anda, berikut adalah saran yang dapat disusun untuk menutup bab tersebut: Diharapkan para tokoh agama atau ulama dapat lebih mengedepankan prinsip transparansi dan keadilan substansial dalam melakukan praktik poligami, dengan tidak hanya memenuhi syarat administratif tetapi juga mempertimbangkan dampak psikologis bagi istri pertama serta beban moral sebagai representasi institusi keagamaan. Selain itu, diperlukan adanya edukasi yang lebih luas di tengah masyarakat mengenai kesetaraan gender dalam Islam, agar otoritas keagamaan tidak disalahgunakan sebagai instrumen pembenaran patriarki yang mensubordinasi perempuan, melainkan menjadi sarana untuk menciptakan kemaslahatan keluarga yang berlandaskan nilai-nilai inklusif.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi komparatif dengan lokasi yang berbeda atau mengeksplorasi perspektif istri ulama secara langsung guna mendapatkan data yang lebih berimbang mengenai dinamika negosiasi di dalam rumah tangga patriarki privat. Selain itu, pengkajian mengenai peran media sosial dalam membentuk persepsi publik terhadap kehidupan domestik ulama juga menjadi peluang riset yang menarik, mengingat adanya pergeseran cara masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial dan pemberian sanksi pasif terhadap tokoh yang dianggap tidak konsisten dengan pesan dakwahnya.